

SKRIPSI

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGEMBANGAN WISATA
BAHARI TAMAN NASIONAL TAKA BONERATE DI
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

ARIYANDI

Nomor Induk Mahasiswa : 105641111419



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN WISATA
BAHARI TAMAN NASIONAL TAKA BONERATE DI
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan
Disusun dan Diajukan Oleh

ARIYANDI

Nomor Induk Mahasiswa : 105641111419

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian : Collaborative Governance dalam Pengembangan
Wisata Bahari Taman Nasional Bonerati di
Kabupaten Kepulauan Selayar

Nama Mahasiswa : Ariyandi

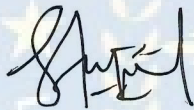
Nomor Induk Mahasiswa : 105641111419

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Hamrun, S.IP., M.Si



Muhammad Amril Pratama Putra, S.IP., M. AP

Mengetahui:

Dekan

Fisipol Unismuh Makassar

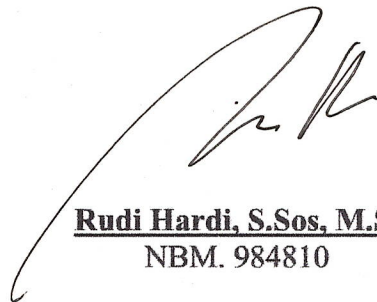
Ketua Program Studi

Ilmu Pemerintahan



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM. 730727



Rudi Hardi, S.Sos, M.Si

NBM. 984810

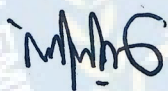
HALAMAN PENERIMAAN TIM

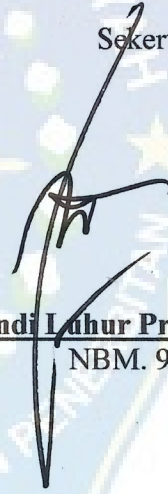
Telah Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dengan nomor 0298/FSP/A.4-11/VIII/46/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana (S.IP) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada Hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024

Mengetahui:

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730727


Dr. Andi Luhur Prianto. S.IP., M.Si
NBM. 992797

Tim Penguji:

1. Dr. H. Amir Muhiddin, M.Si
2. Ahmad Taufik, S.IP., M.AP
3. Hamrun, S.IP., M.Si
4. Hardianto Hawing, ST., MA

()

()

()

()

ABSTRAK

Anriyandi, Hamrun, Muhammad Amril Pratama Putra. *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Wisata Bahari Taman Nasional Taka Bonerate Di Kabupaten Kepulauan Selayar

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian studi kasus (*case studies*) dengan penelitian yang mendalam terkait individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan dan sebagainya.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Dinamika dalam kolaborasi pengelolaan pariwisata Taka Bonerate sudah cukup terlaksana dengan baik walaupun dalam pengungkapan sudah cukup baik karena melibatkan pihak kelompok masyarakat namun kelompok ini secara kelembagaan tidak terlalu aktif, serta komunikasi belum berjalan dengan baik juga kurangnya kepercayaan antara kedua pihak dan komitmen mereka belum kuat walaupun dalam berkolaborasi sudah mengacu pada SK Kepala Dinas Pariwisata. Tindakan-tindakan kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata Taka Bonerate dalam memfasilitasi kolaborasi sudah cukup maksimal karena jarang ada pelatihan dan sosialisasi tentang kepariwisataan guna meningkatkan kemampuan pihak yang berkolaborasi, dan untuk memajukan proses kolaborasi pihak yang bekerjasama jarang melakukan pertemuan. Dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi pengelolaan pariwisata Taka Bonerate sudah memberikan dampak berupa kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh akan kepariwisataan serta membuka peluang pendapatan kepada masyarakat.

Kata kunci: *Collaborative Governance*, strategi, pariwisata

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan kesehatan, kasih sayang serta rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai bukti dari perjalanan dan perjuangan yang panjang serta merupakan sebuah jawaban dari doa yang tiada hentinya dipanjatkan oleh orang-orang terkasih.

Skripsi ini berjudul “***Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Wisata Bahari Taman Nasional Taka Bonerate Di Kabupaten Kepulauan Selayar**”. Yang dimana karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan serta meraih gelar Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya penulis ucapkan untuk kedua orang tua tercinta **Ayahanda Muh Ilyas** dan **Ibunda Raja Pati** yang rela berkorban tanpa pamrih dalam membesarkan, menyayangi, mendidik, dan mendoakan, serta tiada hentinya memberi dukungan disertai segala pengorbanan yang tulus dan ikhlas demi kesuksesan anaknya.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak selama penulis menyusun skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Ucapan terima kasih kepada Bapak Hamrun, S.IP., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Amril Pratama Putra, S.IP., M.AP selaku

pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Bapak Dr. H. Abd Rakhim Nanda, ST.MT. IPU selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Ahmad Harakan, S.IP,M.H.I selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Segenap Dosen dan seluruh Jajaran Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah mencurahkan segala pengetahuan yang dimiliki selama proses pembelajaran sehingga dapat menjadi pengetahuan bagi penulis.
6. Pihak kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah memberikan izin dan bantuan untuk melakukan penelitian, para Staf Pegawai kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang telah membantu memberikan informasi, serta data-data dan juga waktu luang yang telah diberikan kepada penulis, penulis sangat terbantu atas bantuan dalam proses penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih kepada kelas IP.D karena telah kebersamai selama masa perkuliahan ini
8. Semua keluarga, sahabat, teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan doa dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga karya skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat kepada semua pihak, tidak ada ilmu yang memiliki kebenaran mutlak, tidak ada kekuatan dan kesempurnaan semuanya hanya milik Allah SWT, dan semoga segala doa dan dukungan yang telah bapak/ibu, saudara/i berikan dapat bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat serta dapat dijadikan referensi bagi para pembaca.

Makassar, 6 juni 2024

Yang Menyatakan

Ariyandi



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kajian Teori.....	9
1. Konsep Collabirative Governance	9
2. Konsep Pengelolaan Pariwisata	18
3. Kerangka Fikir	20
4. Fokus Penelitian	21
5. Deskripsi Fokus Penelitian.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	23

B. Jenis dan Tipe Penelitian	23
C. Sumber Data	24
D. Informan Penelitian	24
E. Teknik Pengumpulan Data	24
F. Teknik Analisis Data.....	25
G. Pengabsahan Data	26
BAB IV HASIL Dan PEMBAHASAN.....	31
A. Deskripsi lokasi penelitian.....	31
B. Hasil Penelitian.....	40
BAB V KESIMPULAN.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	63

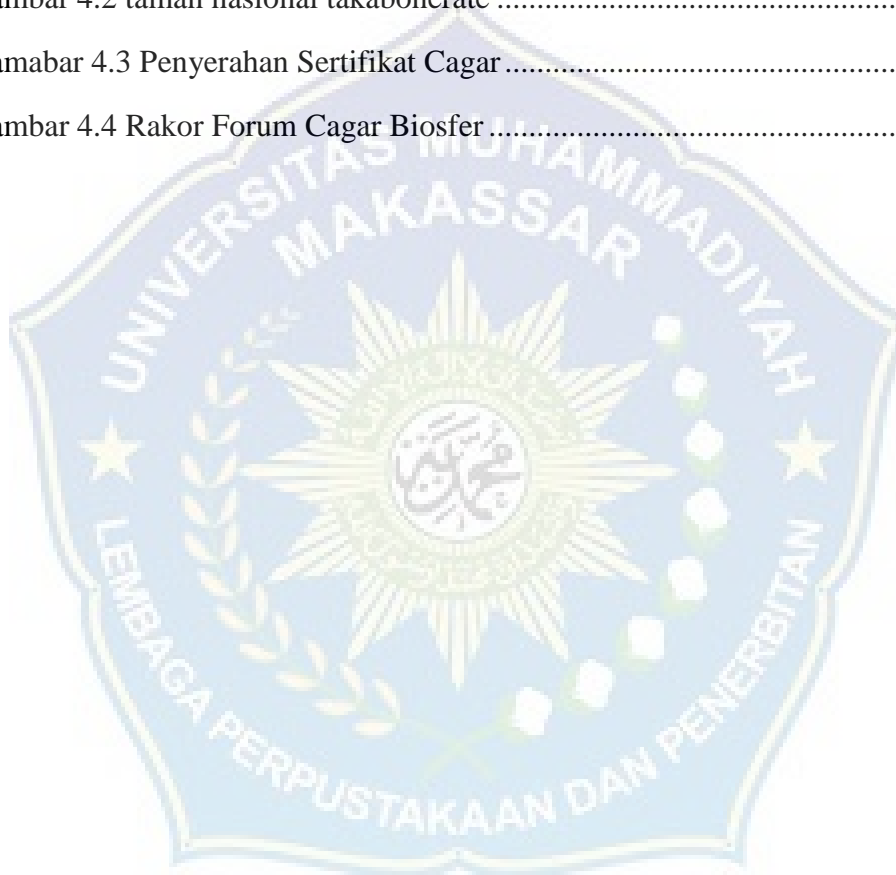
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	7
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	35
Tabel 4.1 struktur Organisasi	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir	30
Gambar 4.1 peta lokasi penelitian.....	41
Gambar 4.2 taman nasional takabonerate	47
Gambar 4.3 Penyerahan Sertifikat Cagar.....	52
Gambar 4.4 Rakor Forum Cagar Biosfer.....	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh manusia untuk menghilangkan rasa stress dengan menikmati pemandangan yang disuguhkan objek wisata. Undang-Undang No.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pariwisata merupakan suatu perjalanan dari suatu tempat ketempat yang lain berisifat kontenporer yang dilakukan individu atau kelompok sebagai usaha untuk menemukan suatu kebahagiaan, keseimbangan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu. (Susilawati, 2016)

Keputusan orang untuk melakukan perjalanan wisata bermula dari keinginan manusia untuk menikmati pemandangan lingkungan yang ada di objek wisata, oleh karena itu pariwisata harus dikelola dan dikembangkan secara baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

Perkembangan tata kelola pada pemerintahan, *collaborative governance* (tata kelola pemerintahan kolaborasi) menjadi fenomena dan (*trend*) baru yang menarik diteliti Ansell dan Gash (Yuniar, 2022). *Collaborative Governance* merupakan salah satu cara untuk merespon keinginan para pemegang kepentingan terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dan merespon keterbatasan pendanaan pemerintah yang tidak

bisa mengikuti perkembangan tuntutan masyarakat akan kinerja pemerintah yang semakin baik, tujuannya untuk mendapatkan sumberdaya guna dalam pelaksanaan pembangunan sesuai harapan para pemegang kepentingan tersebut. Sumber daya tersebut berada dan dimiliki oleh para pemegang kepentingan (Tri Sambodo, 2016).

Beberapa prasyarat terciptanya proses kolaborasi, yaitu: (1) Terdapat partisipasi para pemangku kepentingan, (2) Terdapat kondisi dimana ada kesetaraan kekuasaan, dan (3) Terdapat aktor-aktor yang kompeten. Pariwisata memiliki sifat yang kompleks oleh karena itu dalam mengelolah pariwisata perlu adanya kerjasama antara swasta, pemerintah maupun masyarakat agar pariwisata dapat berkembang secara baik dan memberikan manfaat bagi manusia. Pembangunan pariwisata mampu menggairahkan aktivitas bisnis untuk menghasilkan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan bagi suatu negara. (Djogeh Harmana, 2021)

Ketika pariwisata direncanakan dengan baik, mestinya akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada sebuah destinasi. Muncul dan berkembangnya kegiatan pada pariwisata tidak lain karena di wilayah tersebut terdapat objek yang spesifik dan unik sehingga memiliki daya tarik yang tidak ada di tempat lain sehingga menarik untuk dikunjungi. Sebagaimana diketahui bahwa wisata mempunyai hakekat keunikan, kekhasan, perbedaan, orisinalitas, keanekaragaman, dan kelokalan sehingga menarik banyak orang untuk melakukan perjalanan wisata (Utama, 2014).

Kepulauan Selayar merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang tentunya memiliki daya tarik tersendiri untuk wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal ini didasarkan pada potensi wisata yang dimilikinya. Daerah yang dikenal sebagai tempat pembuatan ini memiliki letak geografis yang terdiri dari daerah pegunungan dan pesisir pantai sehingga memiliki kekayaan objek budaya dan objek wisata. Sehingga menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Salah satu objek yang sangat diminati oleh para wisatawan adalah Taman Nasional Taka Bonerate yang merupakan taman laut dengan kawasan atol terbesar ketiga di dunia. Hamparan atol ini terbentang sekitar 220 ribu hektar, dengan sebaran terumbu karang hingga 500 kilometer persegi (Tamrin & Raharja, 2021).

Pengembangan wisata pantai dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang pada hakekatnya adalah suatu proses pengontrolan tindakan manusia, agar pemanfaatan sumberdaya alam dapat dilakukan secara bijaksana dengan mengindahkan kaidah kelestarian lingkungan. Penempatan wisata dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan acuan bagi pemerintah, dalam hal ini Dinas Pariwisata dalam merencanakan dan mengembangkan kegiatan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar termasuk Taman Nasional Taka Bonerate secara terpadu.

Terkait Pengelolaan dan pengembangan wisata pantai Selayar, pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat. Dasar dari kolaborasi antara

kedua pihak adalah Kepala Dinas Pariwisata yang mengakui bahwa pengembangan wisata pantai Selayar terjadi kolaborasi karena adanya keterlibatan para pemangku kepentingan dalam merawat dan mengembangkan objek wisata tersebut. Namun kolaborasi yang dilakukan ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena masyarakat tidak terlalu aktif dan masih kurangnya informasi serta upaya pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga kolaborasi tidak berjalan dengan efektif (Tamrin & Raharja, 2021).

Objek wisata pantai Selayar yang sudah mendunia memiliki potensi yang sangat besar. Kepulauan Selayar menawarkan hal seperti pantai pasir putih dan pemandangan alam bawah laut. Namun dalam pengelolaannya masih mengalami kendala. Peran pemerintah daerah sebagai pengelola belum maksimal dan menunjukkan keterbatasan dalam kapasitasnya mengelola pariwisata. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah menjadi persoalan yang mendasar untuk mengembangkan sektor pariwisata pantai Selayar, karena untuk mengembangkan pantai Pulau Selayar dibutuhkan sumber daya yang memadai.

Collaborative governance adalah jenis pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga pemerintah memiliki hubungan langsung dengan pihak-pihak non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan. yang formal, deliberatif, berbasis konsensus, dan berfokus pada pembuatan atau pelaksanaan kebijakan publik, atau mungkin juga dalam program aset publik. Membutuhkan wadah atau institusi untuk mengelola kerjasama

antar stakeholder, termasuk pemerintah daerah, perusahaan, masyarakat, dan pemangku adat untuk mengembangkan pelestarian kebudayaan, konsep kolaborasi dimaksudkan untuk mempertahankan cagar budaya berupa taman nasional yang dapat dibuat dan diterapkan untuk kebaikan komunitas yang mengembangkannya (Emerson, 2011).

Sebagai upaya untuk mempertahankan keragaman, Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil dimaksudkan untuk membentuk dasar untuk pengelolaan wilayah pesisir. Peraturan Daerah adalah komponen penting dari konsep Peraturan Perundang-Undangan, dan Pasal 1 menyatakan bahwa "sumber daya alam yang tinggi dan sangat penting yang terkandung di dalamnya dapat dikembangkan untuk kepentingan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, dan penyangga kedaulatan negara secara berkelanjutan dan berwawasan global dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional"

Perda Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2011 tentang pengelolaan wilayah pesisir berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata, untuk merencanakan dan mengintegrasikan potensi pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar saat ini, termasuk Taman Nasional Taka Bonerate.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 15 April 2024, diketahui bahwa pemerintah bekerja sama dengan masyarakat untuk

mengelola dan mengembangkan pariwisata Taman Nasional Taka Bonerate. Kolaborasi didasarkan pada SK Kepala Dinas Pariwisata, yang mengakui bahwa pengelolaan pariwisata Taman Nasional Taka Bonerate terjadi dalam kolaborasi karena semua pemangku kepentingan terlibat dalam menjaga dan mengembangkan objek wisata. Namun, kerja sama ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. karena masyarakat tidak terlalu aktif dan kurangnya informasi, serta upaya pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga kerja sama tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan paparan diatas menjadi pertimbangan atau alasan penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai ***“Collaborative Governance dalam Pengembangan Wisata Bahari Taman Nasional Taka Bonerate di Kabupaten Kepulauan Selayar”*** dalam penulisan proposal ini penulis mencoba menggali informasi mengenai kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan wisata pantai di Kabupaten Kepulauan Selayar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka untuk memudahkan proses penelitian diperlukan adanya perumusan masalah. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Wisata Bahari Taman Nasional Taka Bonerate di Kabupaten Kepulauan Selayar?”

c. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Wisata Bahari Taman Nasional di Kabupaten Kepulauan Selayar.

d. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Dibidang ilmu Manajemen Pemerintahan, dapat menambah wawasan mengenai pengelolaan pariwisata.
 - b. Menambah wawasan mengenai studi *Collaborative Governance* dalam pengelolaan pariwisata.
2. Secara Praktis
 - a. Pemerintah, penelitian ini diharapkan Sebagai bahan pertimbangan Pemerintah dalam memberikan kesadaran warga tentang pengelolaan pariwisata yang baik.

- b. Masyarakat, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengelolaan pariwisata dan hasil-hasilnya yang telah dicapai, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas kebijakan lebih lanjut.



Collaborative governance adalah pendekatan partisipatif untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di mana beberapa pihak, seperti bisnis, lembaga pemerintah, organisasi nirlaba, dan masyarakat, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama atau menyelesaikan masalah yang sulit. Ini mencakup pembagian tanggung jawab, sumber daya, dan wewenang pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam pemerintahan kolaboratif, para pemangku kepentingan bekerja sama melalui proses pembentukan konsensus, komite bersama, tim tugas, atau kemitraan publik-swasta. Tujuannya adalah untuk mengembangkan solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan terhadap masalah yang kompleks dengan memanfaatkan sumber daya, perspektif, dan keahlian yang berbeda dari berbagai pemangku kepentingan.

Collaborative governance sering membutuhkan pembangunan kepercayaan dan hubungan antara peserta, dan melibatkan transparansi, inklusi, pengambilan keputusan bersama, dan pertanggungjawaban timbal balik. Secara keseluruhan, kerja sama pemerintahan dipandang sebagai cara untuk memanfaatkan kebijaksanaan dan sumber daya dari berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas, legitimasi, dan keberlanjutan kebijakan dan program publik dengan memanfaatkan kebijaksanaan dan sumber daya kolektif dari berbagai pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan menggunakan *publish or perish* ditemukan 68 artikel jurnal dengan rentang waktu 2012-2023 yang berkaitan erat dengan kata kunci anggaran *collaborative governance*. Artikel-artikel tersebut kemudian dikelola menggunakan *Vosviewer* untuk menentukan posisi proyek penelitian peneliti. Dari hasil olahan data *Vosviewer* ditemukan Dalam penelusuran kepustakaan menggunakan platform "*Publish or Perish*," ditemukan sebanyak 68 artikel yang berkaitan dengan *collaborative governance* dalam rentang tahun 2012 hingga 2023. Dalam artikel-artikel tersebut kemudian telah dianalisis dan dimasukkan ke dalam aplikasi *Vosviewer* guna mengidentifikasi fokus, lokasi, dan objek penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

Artikel-artikel tersebut membentuk landasan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *collaborative governance*. Beberapa persamaan dan perbedaan yang dapat diidentifikasi antara penelitian-penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan mengenai *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Wisata Bertaraf Internasional di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Adapun persamaannya adalah sebagai berikut.

a. Fokus..Pengaruh Interoperabilitas

Penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan juga akan berfokus pada *collaborative governance* dalam pengembangan wisata.

b. Waktu..Penelitian

Kedua penelitian memiliki waktu penelitian yang sesuai atau sejalan, yaitu dari tahun 2012 hingga 2023, menunjukkan bahwa isu ini relevan dan berkelanjutan dalam kurun waktu tersebut.

c. Analisis dengan Aplikasi *Vosviewer*

Keduanya menggunakan aplikasi *Software Vosviewer* untuk menganalisis dan memvisualisasikan jaringan penelitian serta mengidentifikasi atau menentukan *trend* dan fokus penelitian sebelumnya.

Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut.

a. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian terdahulu yang relevan dengan judul ini belum memfokuskan pada Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai lokasi dan objek penelitian. Penelitian yang akan dilakukan akan lebih terfokus pada konteks tersebut.

b. Efektivitas Pelayanan Publik

Salah satu perbedaan utama adalah fokus pada efektivitas pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penelitian yang akan datang. Ini adalah variabel terikat yang tidak selalu menjadi fokus di semua penelitian terdahulu.

c. Spesifik Lokasi

Penelitian yang akan dilakukan akan mengkaji *collaborative governance* dalam pengembangan wisata bertaraf internasional di

Kabupaten Kepulauan Selayar yakni pada Taman Nasional Taka Bonerate secara spesifik atau terkhususnya. Penelitian terdahulu mungkin memiliki fokus yang lebih umum atau berbeda dalam lokasi atau objek penelitiannya.

Dengan membandingkan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan, Maka peneliti tertarik memahami bagaimana *collaborative governance* dalam pengembangan wisata bahari Taman Nasional Taka Bonerate di Kabupaten Kepulauan Selayar.

B. Kajian Teori

1. Konsep *Collaborative Governance*

a. Pengertian *Collaborative*

Collaborative (kolaboratif) yang berarti bekerja sama atau *collaboration* yang berarti kerja sama. Dalam pengertian yang lebih luas Frans & Bursuck mendefinisikan kolaboratif sebagai gaya atau cara yang dipilih oleh para professional untuk pencapaian tujuan bersama. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang terlibat didalam kegiatan kolaboratif memiliki tujuan yang sama, tidak boleh berbeda, sehingga membutuhkan adanya mekanisme perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut secara bersama sehingga tujuan akan dapat dicapai (Ramdani et al., 2020). Hal ini sesuai dengan pendapat Idol & Baran yang menyatakan bahwa in *collaborative, planning and implementing are joint effort*.

Ini berarti bahwa dalam pelaksanaan kolaboratif yang efektif kegiatan perencanaan dan pelaksanaan merupakan usaha bersama (Ifdal, 2015).

Secara lebih spesifik mengenai kerja sama yang bersifat kolaboratif melibatkan kerjasama antar pihak yang intensif, termasuk adanya usaha secara sadar untuk melakukan *eligment* dalam tujuan, strategi, agenda, sumberdaya dan aktivitas. Kedua institusi yang pada dasarnya memiliki tujuan yang tidak sama membangun *shared vision* dan berusaha mewujudkannya secara bersama (Agustina, 2018).

Dengan adanya visi yang sama maka setiap komponen memungkinkan untuk berpartisipasi dalam urusan yang disepakati bersama. Dari konsep kolaboratif yang memungkinkan untuk terjadinya kerjasama diantara ketiga pilar *governance* karena sudah diyakini adanya visi bersama maka akan semakin menumbuhkan partisipasi yang tinggi pada sektor non pemerintahan. Masyarakat dan pihak swasta memperoleh ruang yang luas untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam manajemen urusan-urusan publik.

Sebagian besar pemerintah telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Akan tetapi kerjasama yang dibangun hanya sebatas konvensional yaitu sebatas pada kerjasama antara pemerintah sebagai pemilik pekerjaan dan lembaga swasta sebagai

kontraktor. Kerjasama ini tidak lebih dari transaksi jual beli barang dan jasa antara pemerintah dan pihak swasta.

Kerjasama yang bersifat jangka pendek dengan intensitas hubungan yang terbatas, sebagaimana diatur dalam kontak. Kemanfaatan kerjasama dihitung sebagai kompensasi atau prestasi dan resiko ditanggung oleh masing-masing pihak. Kalau dilihat dari pola kerjasama tersebut kelihatannya sudah ada kemitraan anantara pemerintah dan non pemerintah namun kenyataannya belum ada. Seharusnya pemerintah lebih memahami kerjasama sebagai kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat, masing-masing dari pihak berusaha melakukan inisiasi, penyamaan visi, penyatuan tujuan, strategi dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Meskipun begitu masing masing pihak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan secara independen. Hubungan yang dibangun dengan masyarakat bersifat kolaboratif, hubungan prinsipal agen tidak akan berlaku karena kerjasama yang terjadi adalah kerjasama antara prinsipal dengan prinsipal (Astuti, 2020).

Para pihak yang berkolaborasi adalah prinsipal sekaligus bertindak sebagai agen untuk mereka sendiri. Kemitraan melibatkan dua pihak untuk saling berbagi sumberdaya, resiko, tanggung jawab dan manfaat. Sifat kerjasama seperti ini membuat kemitraan berorientasi pada kepentingan jangka panjang karena

memerukan daya tahan dan interaksi yang cukup tinggi dari kedua pihak (Niswati et al., 2020).

b. Pengertian *Governance*

Pembahasan mengenai *Governance* sudah mengalami perkembangan yang panjang, *governance* memiliki empat elemen dasar, yaitu: 1) dominasi jaringan (*the domination of network*), dalam sebuah kebijakan formal, pemerintah di dominasi oleh orang-orang yang memiliki pengaruh, hal ini berkaitan dengan suatu barang dan jasa yang akan diproduksi, 2) kemampuan dari negara yang semakin menurun untuk melakukan kontrol langsung (*the state's declining capacity for direct control*) (Silalahi & Syafri, 2015).

Walaupun kini pemerintah tidak lagi melakukan kontrol terpusat akan kebijakan publik, akan tetapi masih memiliki kekuatan untuk mempengaruhinya. Kini kekuatan negara dikaitkan dengan kemampuannya dalam bernegosiasi dan berunding dengan aktor yang ada dalam jaringan kebijakan. semua anggota yang ada dalam jaringan ini diterima sebagai mitra dalam sebuah proses kebijakan, 3) menggabungkan sumber daya publik dan swasta (*the blending of public and private resources*) (Bachtiar et al., 2022). Para aktor publik dan swasta bekerjasama untuk memperoleh sumber daya yang tidak bisa didapatkan secara mandiri. Seperti, menggunakan suatu perusahaan swasta untuk

mengimplementasikan sebuah kebijakan memungkinkan pemerintah untuk menghindari beberapa masalah prosedural serta akuntabilitas yang mahal dan memakan waktu yang relatif lama.

Perusahaan mampu melakukan negosiasi kepada pemerintah untuk membiayai proyek-proyek yang menguntungkan kepentingan publik akan tetapi tidak mungkin dibiayai oleh pihak swasta sendiri, dan 4) penggunaan beberapa instrumen (*use of multiple instrument*). Ini merupakan peningkatan keinginan untuk mengembangkan dan menggunakan metode non-tradisional dalam membuat dan menjalankan kebijakan publik. Hal ini juga digunakan melalui instrumen tidak langsung, misalnya menggunakan intensif pajak untuk mengubah sebuah perilaku (Emerson & Woo, 2022) telah mengemukakan bahwa *governance* adalah perubahan sistem tata pemerintahan yang meliputi:

- 1) Pergantian dari sistem hirarki dan pasar menjadi sistem jaringan dan kemitraan.
- 2) Melakukan interkoneksi antara administrasi negara dengan masyarakat sipil.
- 3) Pergantian sistem administrasi yang mengandalkan penekanan dan kontrol menjadi pengarahan dan koordinasi.
- 4) Pergantian aktivitas pemerintah dari pengaturan dan intruksi menjadi negosiasi dan diplomasi.

- 5) Penyertaan aktor non negara dalam proses kebijakan dan pelayanan publik.

Dari wacana konseptual hingga praktis, konsep *governance* ternyata masih dihadapkan dengan persoalan yang besar dan menjadi tantangan bagi para ahli administrasi publik, masalah yang muncul sehubungan dengan paradigma manajerial dan demokrasi. Bevir (dalam Zaenuri 2016). Dari paradigma manajerial, organisasi dengan banyak aktor-aktor dalam jaringan masih kurang memperlihatkan komando yang jelas misalnya birokrasi yang bersifat hirarkis. Para pembuat kebijakan dan lain-lain telah berusaha untuk mendapatkan cara yang efektif bertindak dalam pengaturan baru.

Keikutsertaan aktor non-negara dalam pembuatan kebijakan dan pelayanan menimbulkan pernyataan apakah hasilnya adalah untuk meningkatkan kualitas demokrasi atau berpihak pada pemerintah atau swasta. Akuntabilitas telah menjadi perhatian oleh lembaga baru dan model partisipasi.

Walaupun masih menimbulkan masalah namun keberadaan teori *governance* kini semakin signifikan dalam pelaksanaan urusan publik. Keikutsertaan aktor non-negara dalam urusan publik dengan tanpa mengedepankan kesejahteraan masyarakat menjadi permasalahan tersendiri. Masalah model partisipasi yang sesuai

agar tidak melemahkan kekuatan negara juga perlu penjelasan lebih mendalam lagi. Jaringan yang seharusnya dibangun untuk menghadirkan kerjasama diantara *stakeholder* masih membutuhkan upaya yang berkelanjutan, demikian juga sebagai akhir dari kolaborasi diantara ketiga pilar *governance* dibutuhkan pola kemitraan yang berorientasi jangka panjang dan memperoleh hasil yang sama-sama menguntungkan.

Sejalan dengan timbulnya pergeseran paradigma dari *government* ke *governance* merupakan cerminan dari *political will* pemerintah untuk menggerakkan reformasi *governance* melalui penerapan prinsip-prinsip *governance* yang baik (*good governance*). Memandang bahwa teori *good governance* memiliki kerumitan yang tinggi dan kendala yang cukup besar maka dibutuhkan sebuah langkah strategis untuk memulai pembaharuan praktek *governance*, pengembangan akan lebih mudah dilakukan jika dimulai dari sektor pelayanan publik termasuk di bidang pelayanan pariwisata.

c. Pengertian *Collaborative Governance*

Salah satu perangkat yang penting dalam istilah *collaborative governance* adalah (*governance*). Sudah banyak penelitian yang telah menghasilkan definisi *governance*, akan tetapi dalam defisi ini hanya sampai pada apa yang dapat di perbuat oleh pemerintah, namun belum secara menyeluruh. Pemerintah

secara umum sebagai pembuat aturan, hukum, peradilan dan praktek-praktek administrasi didukung untuk menahan, mengonsep dan memacu penyediaan barang publik. Batasan tersebut memberikan ruang untuk struktur pemerintah tradisional dan hal tersebut membangun pengambilan kebijaksanaan secara publik atau swasta. Pemerintah mengarah pada aturan dan membuat arahan pengambilan keputusan.

Ansell dan Gash menjelaskan bahwa strategi baru dari pemerintahan disebut sebagai pemerintahan atau kolaboratif *collaborative governance*. Bentuk dari *governance* yang melibatkan berbagai *stakeholders* atau pemangku kepentingan secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama (Ansell & Gash, 2008).

Ansell dan Gash menjelaskan *collaborative governance* adalah suatu pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola program ataupun aset publik (Ansell & Gash, 2008).

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Gray bahwa kolaborasi merupakan suatu proses berfikir untuk menyelesaikan suatu masalah publik sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi yang melibatkan berbagai instansi pemerintah, swasta dan lain-lain (Haryono, 2012). Jonathan menjelaskan kolaborasi sebagai jalan diantara orang-orang yang saling berkelanjutan.

Kesimpulan penjelasan diatas, pada prinsipnya kolaborasi merupakan bentuk interaksi, bekerja bersama, kompromi antara elemen yang saling terkait baik organisasi, pribadi dan pihak-pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung yang memperoleh akibat dan manfaat.

Nilai-nilai yang memulai sebuah proses kolaborasi merupakan cara yang sama, kesamaan pendapat, kemauan untuk berperoses, saling menguntungkan, kejujuran, kasih sayang serta berbasis publik.

Konsep kolaborasi dipakai untuk mengilustrasikan hubungan kerja sama yang diperbuat pihak-pihak tertentu. Banyaknya penjelasan yang telah dikemukakan dengan sudut yang tidak sama namun didasari prinsip yang sama yaitu kebersamaan, bekerja bersama, membagi tugas, sama rata, dan akuntabilitas. Namun kolaborasi sangat sulit dideskripsikan dalam hal

menggambarkan hakikat dari apa yang ada dalam kegiatan ini (Tresiana & Noverman Duadji, 2017).

Pendapat ahli, mengemukakan bahwa penjelasan dasar, diambil bahwa *Governance* mengarah pada aturan dan pola yang memandu pengambilan keputusan bersama. Bahwa intinya adalah pada pengambilan keputusan dalam arti bersama bahwa pemerintah tidak berbicara tentang satu individu yang melahirkan keputusan akan tetapi tentang kelompok individu atau organisasi atau sistem organisasi yang melahirkan keputusan (Stoker dalam Ansell & Gash, 2008).

Kolaborasi berarti bekerja bersama atau bekerjasama dengan orang lain. Ini menyiratkan aktor individu, kelompok atau organisasi bekerjasama dalam usaha yang sama. Para aktor bekerja sama dengan yang lain dengan syarat dan ketentuan yang seperti kita ketahui dapat sangat bervariasi. Kata "*collaboration*" pada awalnya digunakan pada abad kesembilan belas ketika perkembangan industrialisasi, organisasi yang lebih kompleks dan pembagian kerja dan tugas meningkat. Ini adalah norma dasar utilitarianisme, liberalisme sosial, kolektivisme, saling membantu dan kemudian manajemen ilmiah dan teori organisasi relasi manusia. Kolaborasi biasanya menarik "putaran" positif. Hal ini sering dilihat sebagai hal yang positif untuk berkolaborasi adalah lebih baik, kreatif, transformasional dan melibatkan hasil yang

bermanfaat. Upaya kolaboratif dapat melibatkan pencapaian beberapa hasil atau hasil alternatif, negasi atau pencegahan sesuatu yang terjadi. Kita dapat berkolaborasi untuk tujuan “baik”. Terjadinya kolaborasi adalah penting sebagaimana sarana dan praktik yang terlibat, motivasi yang para pelaku, hasil yang diinginkan dan tujuan yang terlibat.

Collaborative governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung *stakeholder* di luar negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan publik dan program-program publik secara cepat.

Kolaborasi diartikan sebagai kerjasama antara individu, kelompok atau antar instansi dalam rangka mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai jika dilakukan secara independent. Dalam bahasa Indonesia, sebutan kolaborasi dan kerjasama masih digunakan secara bergantian dan belum terlihat usaha untuk menampilkan perbedaan dan kedalaman makna dalam sebutan tersebut. Secara umum dikenal sebutan kerjasama dibandingkan kolaborasi, dan belum ada pemahaman yang lebih jauh tentang pola yang seharusnya digunakan. Model *collaborative governance* berdasarkan empat variabel dikemukakan oleh (Ansel dan Gash, 20017) yaitu sebagai berikut: *conditions*, *institutional design*,

leadership, and collaborative process. Kemudian terdapat tiga komponen penting dalam mendorong desain kelembagaan dan kepemimpinan yaitu; *time, task and target*.

Dalam kerjasama seperti ini, seluruh pihak-pihak yang melibatkan diri dalam kerjasama tetap memiliki otonominya sendiri. Para pihak yang berkolaborasi adalah prinsipal dan sekaligus juga bertindak sebagai agen untuk diri mereka sendiri. Mereka sepakat bekerjasama karena memiliki kesamaan visi dan tujuan untuk diwujudkan secara bersama-sama yang mungkin akan sulit dicapai ketika masing-masing bekerja sendiri (dalam Dwiyanto, 2010:258). Strategi baru dari pemerintahan disebut sebagai pemerintahan kolaboratif atau *collaborative governance*. Bentuk dari *governance* yang melibatkan sebagai *stakeholders* atau pemangku kepentingan secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama.

Sejalan dengan pengertian di atas juga menjelaskan bahwa *collaborative governance* adalah suatu pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus deliberatif yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola program ataupun aset publik.

Beberapa ahli menggambarkan tahapan dari proses kolaborasi. Pendapat Gray (dalam Emerson et al., 2012) memberikan penjelasan mengenai tiga tahapan kolaborasi yaitu masalah pengaturan, penetapan arah serta pelaksanaan. Tahapan kolaborasi dipandang sebagai suatu rangkaian strategi yang berkisar untuk merubah masyarakat melalui “*empowerment collaboration*” atau kolaborasi pemberdayaan.

Collaborative governance merupakan sebuah proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan 10 dan atau instansi publik, instansi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja. O’Leary Bingham dan Gerard mendefinisikan bahwa *collaborative governance* merupakan sarana untuk mengendalikan proses yang mempengaruhi keputusan dan tindakan dalam sektor swasta, publik dan masyarakat (Emerson et al., 2012).

Collaborative Governance merupakan usaha serta respon yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik yang terjadi. Dimana dalam penyelesaian masalah publik ini pemerintah harus melakukan kerjasama dengan aktor non

pemerintah seperti pihak swasta, masyarakat dan lain-lain (Mutiarawati & Sudarmo, 2021).

d. Proses *Collaborative Governance*

Proses kolaborasi menunjukkan sebuah sistem yang dimana kolaborasi mewakili model yang mendominasi untuk perilaku, pengambilan keputusan dan aktivitas. Dalam proses kolaborasi ini memiliki tiga variabel. Dimana dalam proses kolaborasi yang perlu diperhatikan antara lain yaitu dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan kolaborasi serta dampak dan adaptasi dalam proses kolaborasi.

Dinamika kolaborasi merupakan penggerak penting dalam proses kolaborasi. Pelaksanaan kolaborasi yang baik terdapat pada keterlibatan prinsip, motivasi bersama dan kapasitas untuk tindakan bersama. Tindakan-tindakan kolaborasi merupakan cerminan dari dinamika kolaborasi. Dimana tindakan-tindakan kolaborasi tidak bisa dicapai bila hanya dilakukan oleh satu organisasi saja yang melakukan tindakan. Hasil dari tindakan kolaborasi biasanya dilihat sebagai dampak sementara yang mengarah kembali kepada dinamika kolaborasi.

Dampak dan adaptasi dalam proses kolaborasi yaitu dampak yang ditimbulkan dari proses kolaborasi. Karakteristik dampak dalam proses kolaborasi ada yang diharapkan dan tidak

diharapkan. Dampak tersebut dapat menghasilkan umpan balik yang kemudian di adaptasi oleh kolaborasi (Emerson et al., 2012).

2. Konsep Pengelolaan Pariwisata

a. Pengertian pariwisata

Methiesson dan Waill (dalam Nawawi, 2013) pariwisata merupakan pergerakan manusia yang sifatnya hanya sementara ke tujuan-tujuan wisata diluar tempat kerja dan tempat tinggal sehari-hari dimana aktivitasnya dilakukan selama tinggal di tempat tujuan wisata dan untuk itu disediakan fasilitas-fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan menurut Baiquni (dalam Nawawi, 2013) pariwisata dapat dimanfaatkan untuk mendorong perubahan hidup melalui peluang kerja yang tersedia, meningkatkan pendapatan dan membaiknya kualitas hidup masyarakat.

Sektor pariwisata adalah salah satu sektor terbesar di dunia sebagai pembangkit ekonomi, namun keberadaan dari pariwisata sangat rentan terhadap bencana baik yang disebabkan oleh perilaku manusia maupun bencana yang disebabkan oleh alam. Menurut Henderson (dalam Zaenuri 2016) pariwisata merupakan industri yang selalu “dihantui” oleh bencana dan krisis, bahkan bisa dikatakan sangat rentan karena mudah dipengaruhi oleh perubahan-perubahan maupun kejadian-kejadian yang ada disekelilingnya. Pariwisata menurut pendapat dari Krapt dan Hunziker (dalam susilawati 2016) adalah keseluruhan dari gejala-gejala yang

diakibatkan perjalanan dan pendiaman orang-orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara, asalkan orang asing itu tidak tinggal menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktivitas yang hanya sementara.

b. Tujuan Pengelolaan Pariwisata

Pengelolaan suatu objek wisata merupakan hal terpenting yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Maka dari itu pengelolaan haruslah dirancang secara matang agar tidak hasilnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pembangunan pariwisata harus melibatkan pemerintah, semua lapisan masyarakat, baik kalangan bawah maupun kalangan atas serta swasta.

Semuanya diharapkan dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pariwisata untuk menunjang pembangunan pariwisata. Masyarakat mempunyai dorongan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan apabila mereka mengetahui apa yang perlu mereka bantu dan mengapa harus ikut membantu. Mereka akan tertarik untuk ikut serta menunjang pembangunan pariwisata apabila mereka telah paham akan mendapat manfaat yang positif. Suwantoro (dalam Nawawi, 2017).

Tata kelola pariwisata yang baik merupakan tujuan serta cita-cita dari semua pihak baik pemerintah, masyarakat maupun swasta agar sektor pariwisata dapat semakin maju berkembang pesat. Pengelolaan suatu objek dan daya tarik wisata, memang tak

lepas dari semua kegiatan yang dapat mendukung berkembangnya kepariwisataan. Menurut Darsoprajitno (Hasanah, 2017).

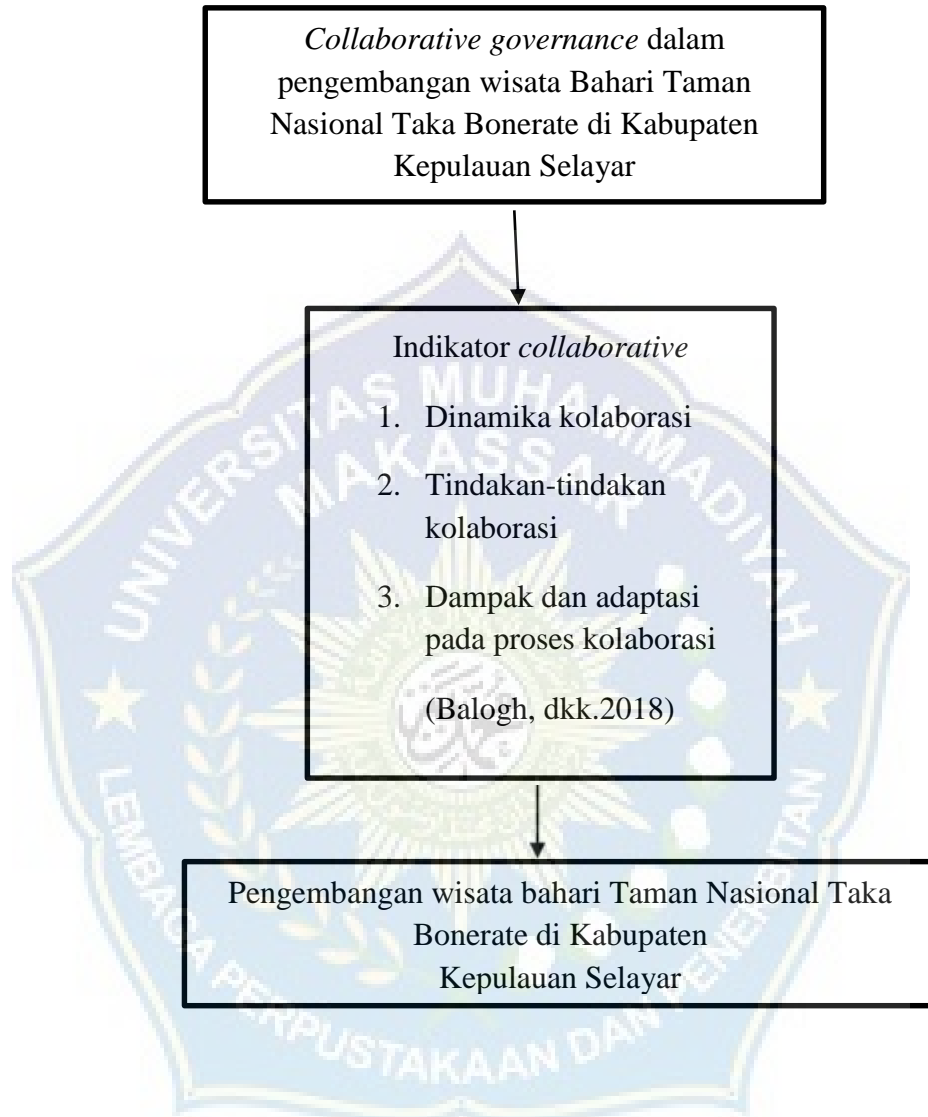
C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dari teori yang digunakan dalam penelitian serta hubungannya dengan perumusan masalah. Mengacu pada konsep kolaborasi, bahwa kolaborasi adalah suatu upaya untuk menggabungkan semua sektor baik pemerintahan maupun non pemerintah untuk mengelola, menata dan mengatur semua urusan bersama guna mencapai hasil yang efektif dan efisien.

Dari penjelasan diatas tersebut, maka dalam penelitian ini akan diuraikan *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata pantai Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun termasuk dalam pengelolaan pariwisata tersebut adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta masyarakat kelompok sadar wisata (POKDARWIS). Dimana tiga proses dalam *Collaborative Governance* yaitu: a) Dinamika Kolaborasi, b) Tindakan-tindakan kolaborasi, c) Dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi. (Balogh, dkk.2018).

Berdasarkan latar belakang dan teori-teori di atas maka kerangka penelitian ini dapat dijelaskan pada bagan berikut ini dengan melihat beberapa indikator pada *Collabortive Governance* dalam pengembangan wisata pantai di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 2.2 Bagan Kerangka Fikir



D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu *collaborative governance* dalam pengembangan wisata bahari Taman Nasional Taka Bonerate di Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan tiga indikator yaitu:

1. Dinamika kolaborasi.
2. Tindakan-tindakan kolaborasi.
3. Dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi Fokus Penelitian Guna memberikan keseragaman pengertian mengenai objek penelitian maka deskripsi fokus penelitian ini adalah proses pengelolaan kerjasama yang dilakukan antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan masyarakat kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam mengelola pantai Pulau Selayar, dengan tiga indikator utama yaitu:

1. Dinamika kolaborasi merupakan penggerak penting dalam proses kolaborasi dan memiliki sifat yang beubah-ubah. Kolaborasi yang baik terdapat dinamika. Di dalam dinamika kolaborasi berfokus pada keterlibatan prinsip, motivasi bersama dan kapasitas untuk tindakan bersama dalam pengembangan wisata bahari Taman Nasional Taka Bonerate di Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Tindakan-tindakan kolaborasi merupakan tindakan yang dilakukan dalam proses kolaborasi seperti tindakan memajukan proses

kolaborasi dan kegiatan di lapangan guna membantu dalam pengembangan wisata bahari Taman Nasional Taka Bonerate di Kabupaten Kepulauan Selayar.

3. Dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi merupakan dampak yang ditimbulkan dari proses kolaborasi. Dampak tersebut dapat menghasilkan umpan balik yang kemudian di adaptasi dalam proses kolaborasi dalam pengembangan wisata bahari Taman Nasional Taka Bonerate di Kabupaten Kepulauan Selayar.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan pertimbangan bahwa pengembangan wisata bahari Taman Nasional Taka Bonerate di Kabupaten Kepulauan Selayar yang melibatkan kelompok sadar wisata belum maksimal dan di lokasi tersebut peneliti dapat mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian. Waktu penelitian dimulai pada tanggal 1 Mei – tanggal 1 Juni 2024.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Pada penelitian kali ini, penulis memilih untuk menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini berupaya untuk memahami *collaborative governance* dalam pengembangan wisata. Kebijakan pemerintah daerah tentang pengembangan wisata. Penggunaan lebih dari satu pendekatan pengumpulan data mengijinkan evaluator menggabungkan kegiatan dan kebenaran dari suatu sumber data.

2. Tipe Penelitian

Pada tipe dalam penelitian ini adalah fenomenologi, yaitu studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut, yang berfokus pada

kolaborasi *stakeholder* dalam pengembangan wisata. Tipe penelitian fenomenologi ini digunakan karena penelitian ingin mendapatkan gambaran serta informasi yang sejelas-jelasnya mengenai pelaksanaan pengembangan wisata dalam bentuk *collaborative governance*.

C. Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti dari hasil, wawancara observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yaitu: *collaborative governance* dalam pengembangan wisata bahari Taman Nasional Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar
2. Data Sekunder adalah data yang didapatkan penulis dari buku-buku, beberapa dokumen berupa laporan-laporan tertulis dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan aspek-aspek keberhasilan pemerintah dalam mengembangkan wisata bahari Taman Nasional Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif prosedur pemilihan informan menurut Bungin (2018) adalah menggunakan “teknik *purposive sampling* dengan cara menentukan *key person* tertentu dengan sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian. *Key person* adalah orang yang mengerti dan bertindak sebagai pelaku di dalam objek penelitian.” Menurut Sugiyono (2012:219). *Purposive sampling* adalah teknik pengumpulan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data tersebut belum mampu

memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang yang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data.

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala dinas pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar dan masyarakat pengelola taman wisata bahari Taka Bonerate.

Tabel 3.1 informan penelitian

no	nama	inisial	jumlah	Instransi
1.	Nur Ihsan Chauruddin,S.S	NI	1	Kepala Dinas Pariwisata
2	Muh Faisal	MF	2	Pengelola
	Ahmad	AH		
3	Hamsir	HA	1	Pedagang
4	Sahabuddin	SH	2	Masyarakat
	Abd Hafid	AA		

E. Tehnik Pengumpulan Data

1. Observasi (Pengamatan langsung), yaitu pengumpulan data yang didapatkan dengan cara pengamatan dan pencatatan terhadap masalah yang berkaitan kolaborasi pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pengembangan wisata bahari Taman Nasional Taka Bonerate di Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. *Interview* (wawancara), dimana peneliti akan berkomunikasi dengan informan sehingga mendapatkan informasi-informasi sesuai dengan penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian dengan menyusun pedoman wawancara.

3. Dokumentasi merupakan teknik untuk mengumpulkan data yang di ambil dari beberapa buku bacaan maupun dokumen dan yang lainnya berhubungan dengan objek penelitian di lokasi penelitian untuk melengkapi data tentang aspek-aspek keberhasilan pemerintah dalam mengembangkan wisata bahari Taman Nasional Taka Bonerate di Kabupaten Kepulauan Selayar.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2012:246) penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai, sehingga datanya sudah jenuh. Hal-hal yang dilakukan dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. Reduksi data (data *reduction*), dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan memfokuskan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh.
2. Penyajian data (data *display*). Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. *Display* data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya

dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi.

G. Keabsahan Data

Sugiyono (2012) Data penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh karena itu peneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut; Triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan banyak waktu. Untuk keperluan triangulasi maka dilakukan tiga cara yaitu:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada pada kantor pemerintah dan lokasi objek wisata terkait *Collaborative governance* dalam pengembangan wisata.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi pada penelitian ini akan diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja, sehingga data yang diperoleh di kantor pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan dari *stakeholder*.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten Kepulauan Selayar adalah Kota Benteng. Kabupaten ini memiliki luas sebesar 10.503,69 km² (wilayah daratan dan lautan) dan berpenduduk sebanyak ±134.000 jiwa. Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari 2 sub area wilayah pemerintahan yaitu wilayah daratan yang meliputi kecamatan Benteng, Bontohara, Bontomanai, Buki, Bontomatene, dan Bontosikuyu, serta wilayah kepulauan yang meliputi kecamatan Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Takabonereta, Pasimurannu, dan Pasilambena.

Dalam kitab hukum pelayaran dan perdagangan *Amanna Gappa* (abad 17), Selayar disebut sebagai salah satu daerah tujuan niaga karena letaknya yang strategis sebagai tempat transit baik untuk pelayaran menuju ke timur dan ke barat. Disebutkan dalam naskah itu bahwa bagi orang yang berlayar dari Makassar ke Selayar, Malaka, dan Johor, sewanya 6 rial dari tiap seratus orang. Belanda mulai memerintah Selayar pada tahun 1739. Selayar ditetapkan sebagai sebuah keresidenan dimana residen pertamanya adalah W. Coutsier (menjabat dari 1739-1743). Berturut-turut kemudian Selayar diperintah oleh orang Belanda sebanyak 87 residen atau yang setara

dengan residen seperti Asisten Resident, Gesagherbber, WD Resident, atau Controleur. Barulah Kepala pemerintahan ke 88 dijabat oleh orang Selayar, yakni Moehammad Oepoe Patta Boendoe. Saat itu telah masuk penjajahan Jepang sehingga jabatan residen telah berganti menjadi Guntjo Sodai, pada tahun 1942. Di zaman Kolonial Belanda, jabatan pemerintahan di bawah kerresidenan adalah Reganschappen.

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Selayar terletak antara 5o42'- 7o35' Lintang Selatan dan 120o15'- 122o30" Bujur Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba disebelah utara, Laut Flores sebelah timur. Laut Flores sebelah selatan dan Selat Makassar di sebelah barat.

Sebelah Utara : Kabupaten Bulukumba

Sebelah Selatan : Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

Sebelah Timur : Laut Flores

Sebelah Barat : Laut Flores dan selat Makassar

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dan memanjang dari utara ke selatan yang terdiri dari gugusan pulau-pulau. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 10.503,69 Km² yang terdiri 1,357,03 Km² daratan dan 9.146,66 Km² wilayah pengelolaan laut.

Gambar 4.1 lokasi peta penelitian



Sumber: google.com

Pasimarannu 176,35, Pasilambena 102,99, Pasimasunggu 114,5, Taka Bonerate 221,07, Pasimasunggu Timur 47,93, Bontosikuyu 199,11, Bontoharu 129,75, Benteng 7,12, Bontomanai 115,56, Bontomatene 159,92, Buki 82,73. Sumber: Kepulauan Selayar Dalam Angka BPS, 2011.

Ketenagakerjaan Penduduk usia kerja dapat didefinisikan sebagai penduduk usia 15 tahun keatas, penduduk tersebut terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Agama Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar pada dasarnya merupakan masyarakat yang religius, beradat dan berbudaya,. Kabupaten Kepulauan Selayar adalah daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama islam dan kebanyakan berasal dari etnis Makassar yang masih mempertahankan tradisi, adat, dan keakraban. sejalan

dengan hal tersebut maka tempat peribadatan bagi penganut agama islam terlihat jauh lebih banyak dari agama lain, sampai dengan akhir tahun 2012 jumlah Masjid sebanyak 173 Unit, Mushollah 24 unit sehingga jumlah tempat ibadah untuk umat muslim sebanyak 197 unit. Sementara tempat ibadah umat nasrani masing-masing tercatat 68 unit gereja protestan, 5 unit gereja katolik, umat budha 2 Unit dan hindu 1unit.

Tingkat pendidikan di kabupaten Kepulauan Selayar setiap tahunnya mengalami terselenggaranya layanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk sumberdaya manusia yang cerdas, profesional dan religius. "Peningkatan layanan pendidikan di semua 44 jenjang pendidikan adalah program utama sebagai jaminan terlaksananya proses pemerataan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar mengutamakan pembangunan pendidikan sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan sumber daya manusia. Hal ini dicerminkan oleh berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengutamakan sektor pendidikan. Peningkatan layanan Pendidikan di semua jenjang pendidikan, Peningkatan Kualitas guru, peningkatan sarana dan prasarana layanan pendidikan, peningkatan kompetensi kelulusan.

Kabupaten Kepulauan Selayar dapat di akses melalui jalur udara dan darat. Terdapat dua maskapai penerbangan Nasional yang melayani rute ke selayar dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Jalur darat dengan menumpang bus dari terminal malengkeri menuju Tanjung Bira, Kabupaten

Bulukumba. Selanjutnya melanjutkan perjalanan laut dengan feri penyeberangan menuju pelabuhan Pamatata dan perjalanan darat menuju Kota Benteng. Aneka alat transportasi di kota Benteng dapat dijumpai. Seperti Mobil, becak, dan perahu. Mobil digunakan sebagai angkutan dalam kota dan antar kecamatan. Becak menjadi kendaraan 45 yang mudah dijumpai di setiap sudut kota. Kapal laut menjadi penghubung antar pulau.

2. Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar

Bahwa dalam rangka implementasi penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah perlu disesuaikan. Bahwa struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah serta perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditinjau kembali. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga memiliki fungsi sebagai berikut :

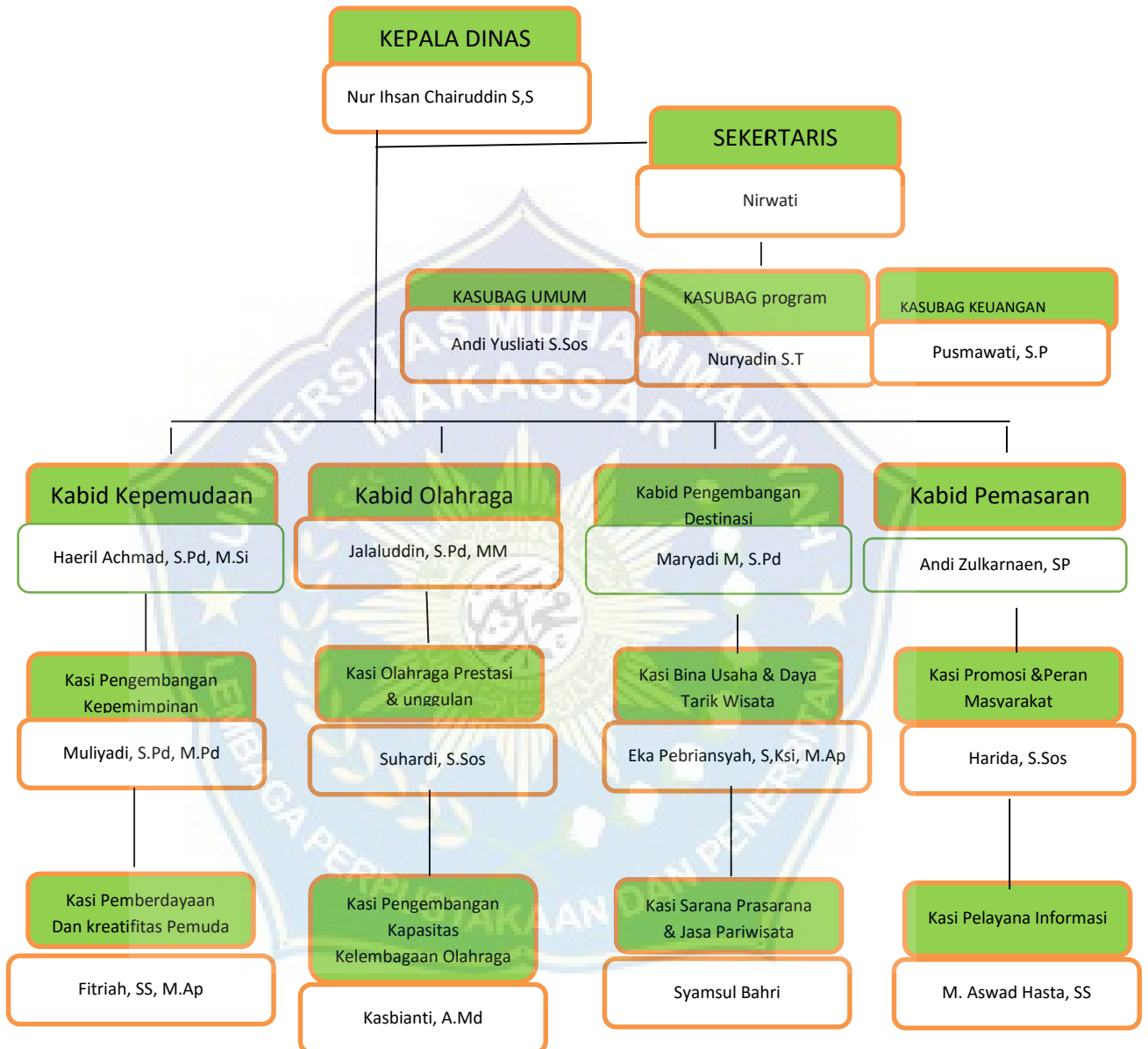
1. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan operasional pembangunan bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga.

2. Melaksanakan penyusunan program kegiatan operasional dan pembangunan bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemuda dan Olahraga.
3. Penetapan, inventarisasi dan pengaturan objek wisata.
4. Menerima pendaftaran dan mengawasi berbagai usaha/industri bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemuda dan Olahraga.
5. Menyelenggarakan pengelolaan Pajak dan Restribusi Bidang Pariwisata,
6. Mengawasi berbagai kegiatan/event bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemuda dan Olahraga masyarakat.
7. Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemuda dan Olahraga
8. Penyelenggaraan kerjasama Nasional dan Internasional bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemuda dan Olahraga.
9. Penyelenggaraan promosi dan Pemasaran bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemuda dan Olahraga.
10. Melaksanakan Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan organisasi dinas. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagan Struktural Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten

Kepulauan Selayar

Bagan 4.1 Struktuk Organisasi



3. Gambaran Wisata Bahari Taman Nasional Taka Bonerate di Kabupaten Kepulauan Selayar

Taman Nasional Taka Bonerate adalah taman laut yang mempunyai kawasan atol terbesar ketiga di dunia setelah Kwajifein di Kepulauan Marshall dan Suvadiva di Kepulauan Maladewa. Luas total dari atol ini 220.000 hektare dengan sebaran terumbu karang mencapai 500 km². Kawasan ini terletak di Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Sejak Tahun 2005 Taman Nasional Taka Bonerate telah di calonkan ke UNESCO untuk menjadi Situs Warisan Dunia. Dalam rangkaian Hari jadi Kepulauan Selayar di lokasi ini setiap tahunnya diadakan festival yang bertajuk Sail Taka Bonerate atau sebelumnya disebut *Takabonerate Island Expedition (TIE)*.

Ada sebanyak lima belas buah pulau di Taman Nasional Taka Bonerate sehingga sangat bagus untuk kegiatan menyelam, selam permukaan, dan wisata bahari lainnya. Topografi kawasan sangat unik dan menarik, di mana atol yang terdiri dari gugusan pulau-pulau gosong karang dan ratahan terumbu yang luas dan tenggelam, membentuk pulau-pulau dengan jumlah yang cukup banyak. Di antara pulau-pulau gosong karang, terdapat selat-selat sempit yang dalam dan terjal.

Pariwisata bahari memiliki daya tarik tersendiri karena obyek jenis wisata ini dapat mengkombinasikan antara daya tarik permukaan laut, untuk melakukan berbagai kegiatan wisata, seperti : berenang (swimming),

memancing (fishing), bersampan dengan dayung (boating), atau berlayar (sailing), selancar air (wave surfing) dan selancar angin (wind surfing), serta berperahu dengan parasit (parasailing). Namun demikian, wisata bahari sangat identik dengan keindahan bawah laut, menyebabkan para wisatawan, terutama wisatawan mancanegara mau saja membelanjakan uangnya untuk melakukan perburuan spot-spot penyelaman yang menarik, sekedar untuk menyelam (diving) dan (snorkling). Di beberapa destinasi ekowisata bahari, para wisatawan bahkan dapat menyaksikan atraksi ikan paus dan rombongan lumbalumba di laut dalam, serta bayi-bayi hiu (baby shark) di laut dangkal.

Gambar 4.2

Taman Nasional Taka Bonerate



Sumber: <https://tntakabonerate.com/id/ekowisata-ke-taman-nasional-taka-bonerate-cocok-untuk-pecinta-pantai-dan-bawah-laut/>

B. Hasil Penelitian

Kawasan Takabonerate memiliki potensi yang besar, khususnya untuk pariwisata bahari. Taman Nasional Takabonerate merupakan destinasi wisata bahari unggulan di Kepulauan Selayar yang juga dikenal sebagai pulau karang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia setelah atol Kwajelein di Kepulauan Marshal dan atol Suvadiva di Kepulauan Maladewa. Takabonerate terdiri dari 21 pulau yang membentuk lingkaran yang dikelilingi oleh terumbu karang. Pulau-pulau tersebut yang dihuni penduduk hanya Pulau Latondu, Pulau Rajuni, Pulau Tarupa, Pulau Jinato, Pulau Pasitallu Tengah, dan Pulau Pasitallu Timur. Sebagian dari terumbu karang di kawasan ini berupa patch reef (gosong) yang muncul ke permukaan pada saat air surut.

Kawasan Takabonerate mempunyai luas 530.765 hektar dengan luas atol ± 220.000 hektar dan telah ditetapkan sebagai Taman Nasional sejak tahun 1992. Bentk terumbu karang di kawasan ini berupa Barrier reef (penghalang), Fringing reef (terumbu karang tepi), dan atol (cincin lingkaran) yang dibentuk oleh 261 jenis karang. Untuk menjangkau kawasan ini, bisa menggunakan speed boat atau perahu masyarakat dari kota Benteng dan dermaga Patumbukang. Jarak tempuh jika menggunakan speed boat mesin 200 PK sekitar 2-3 jam dari Kota Benteng. Sedangkan jika menggunakan perahu masyarakat sekitar 8 jam dari Benteng dan 6 jam dari dermaga Patumbukang. Musim kunjungan terbaik Taman Nasional Takabonerate yaitu bulan April

hingga Juni dan Oktober hingga Desember setiap tahunnya. Untuk melakukan aktivitas penyelaman di kawasan ini bisa menggunakan fasilitas Tinabo Island Resort. Indikator yang digunakan yaitu dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan kolaborasi, dan dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi

1. Dinamika Kolaborasi

Dinamika kolaborasi yang terjadi meliputi aspek Motivasi dan Prinsip Bersama. Motivasi yang indikator turunannya berkaitan dengan kepercayaan dan pemahaman bersama. Kepercayaan yang terbangun antara dinas pemuda olahraga dan pariwisata dengan asosiasi usaha pariwisata terjadi karena komunikasi dan kerjasama yang intens selama beberapa tahun terakhir. Hal inilah yang menjadi dasar awal dari sebuah kolaborasi komunikasi dan kerjasama. Sedangkan untuk pemahaman bersama berkaitan dengan pemahaman akan tugas dan fungsi masing – masing antara pelaksana kolaborasi. Pemahaman ini sangat diperlukan untuk menghindari overlap atau tumpang tindih kewenangan.

Taka Bonerate merupakan salah satunya. Ciri khas dari taman nasional ini adalah topografi kawasan yang sangat unik dan menarik, di mana atol yang terdiri dari gugusan pulau-pulau gosong karang dan rataan terumbu yang luas dan tenggelam dan membentuk pulau-pulau. Karang atol di TN Taka Bonerate merupakan karang atol terbesar ketiga di dunia, setelah Kwajifein di Kepulauan Marshall dan Suvadiva di Kepulauan Maldiva, dengan luas seluruh kawasan mencapai 530.765 hektare.

Penduduk kawasan TN Taka Bonerate terdiri dari dua etnis utama, yaitu Bajo dan Bugis. Orang Selayar yang jumlahnya lebih sedikit, pada umumnya mengaku sebagai orang Makassar. Sebetulnya orang Bajo, menurut keterangan informan dari kawasan, merupakan penduduk mayoritas pertama, dan kemudian Bugis. Bertemunya kedua etnis mayoritas tersebut menjadi potensi bagi proses dinamika usaha dan kegiatan eksploitasi sumberdaya laut kawasan, sebab orang Bajo telah menguasai pengetahuan lokal dan tradisi eksploitasi wilayah karang, sementara orang Bugis memiliki etos usaha dagang yang kuat. Penyebaran etnis tersebut pada pulau-pulau di Taka Bonerate adalah sebagai berikut: Rajuni Kecil (Bugis dan Bajo secara berimbang), Rajuni Besar (Bugis, Bajo dominan), Tarupa (Bugis, Bajo dominan), Latondu Besar (Bugis dominan, Bajo).

Salah satu tujuan pengelolaan kawasan Taman Nasional Taka Bonerate adalah pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata. Berawal dari kajian perlunya pengembangan pariwisata dan International Networking, Balai TN Taka Bonerate menginisiasi pertemuan para pihak untuk memberikan tanggapan, serta saran dan inisiatif membangun dalam pengembangan pariwisata alam dan international networking, khususnya di Taman Nasional Taka Bonerate.

Hal ini di sampaikan oleh informan Kepala dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Selayar yang mengatakan bahwa penduduk sekitar Tanaka Bonerate berbagai asal dan suku, hal ini dijelaskan bahwa.

“Masyarakat mampu berkomunikasi dengan beberapa bahasa etnis yang ada di pulau. Persamaan keyakinan sebagai muslim turut mempermudah pembauran. Di Pulau Rajuni Besar dan Pulau Latondu, kelembagaan adat juga mempersatukan Bugis dan Bajo. Beberapa tradisi dan upacara adat masih berlangsung, khususnya berkaitan dengan kehidupan laut, seperti larung saji makan bersama secara adat (Bajo: ngittingi). Upacara dilakukan saat pencaharian susah atau prihatin. Sejalan dengan berkembangnya pemahaman agama, diakui oleh bapak Kepala Dinas (wawancara oleh NI pada tanggal 5/6/2024)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Prinsip bersama yang baru coba dikembangkan oleh pihak pelaksana kolaborasi dinas pemuda olahraga dan pariwisata dengan asosiasi usaha pariwisata yakni membuka seluas – luasnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Pariwisata berbasis masyarakat dimulai dengan terbitnya regulasi tentang kepariwisataan.

Wujud peran para pihak tertuang dalam pertemuan yang diinisiatif oleh Balai TN Taka Bonerate, bersama para pihak diantaranya dari LIPI, Direktorat PJKKHL Kemenhut, Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, turut hadir Kapolres Kepulauan Selayar, Dandim 1415 Kepulauan Selayar, Eco Natural Society , SSD, Kampung Penyus serta berbagai kalangan pemerhati pariwisata Kepulauan Selayar. Acara pertemuan ini berlangsung pada tanggal 23-24 April 2014 di Kantor Bupati Kepulauan Selayar. Dalam pertemuan ini yang mengambil Judul “ Workshop Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan International Networking” telah memberikan hasil kesepakatan untuk berupaya pengembangan jasa lingkungan khususnya bidang pariwisata bahari dan mengembangkan jejaring internasional yang lebih kuat.

Sebuah penghormatan dan kebanggaan bagi warga masyarakat Kepulauan Selayar disaat momentum penyerahan sertifikat Cagar Biosfer Taka Bonerate Kepulauan Selayar. Berawal dari inisiatif para mitra, khususnya Balai TN Taka Bonerate, MAB-LIPI Indonesia, Pemda Selayar serta dukungan penuh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak diusulkannya September 2014, yang berbuah diterimanya usulan Cagar Biosfer Taka Bonerate Kepulauan Selayar sebagai anggota jaringan Cagar Biosfer Dunia pada pertemuan internasional ICC-UNESCO 9 Juni 2015 di Paris Perancis.

Gambar 4.3 Penyerahan Sertifikat Cagar Biosfer Taka Bonerate

Kepulauan Selayar, 12 Sept 2015



Sumber: <https://tntakabonerate.com/id/mewujudkan-taka-bonerate-menjadi-taman-nasional-bertaraf-dunia/>

Pengelolaan sumber daya laut yang berbasis masyarakat dipandang sebagai paradigma baru. Paradigma ini muncul karena kekuarng puasan terhadap pendekatan sebelumnya, yang cenderung individualistik dan bias ekonomi pasar. Pendekatan pembangunan berbasis masyarakat

menggunakan ikatan-ikatan horizontal sebagai pilar utama dan menggunakan kaca mata yang lebih luas (dari sekedar pembangunan ekonomi) dapat dipandang sebagai inovatif dalam pembangunan. Ikatan horizontal dan suau komunitas merupakan bagian bagian kekuatan modal sosial yang sangat penting untuk mengembangkan berbagai tindakan kolektif. Salah satu syarat tumbuhnya perilaku kolektif adalah dengan terbangunnya suasana yang partisipasi, mulai perencanaan sampai pelaksanaan.

Hal ini dijelaskan oleh informan Pengelola wisata yang mengatakan bahwa Sumber daya laut yang ada di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate perlu sebuah perencanaan pengelolaan yang tepat, hal ini dijelaskan bahwa:

“Kondisi masyarakat lokal perlu ada intervensi dari sebuah program pemberdayaan. Program dengan menari pencaharian alternatif selain sebagai nelayan. Hal yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak NGO dalam sebuah program bagi masyarakat lokal. Proses penyadaran dan pemberian pendidikan pengetahuan terhadap teknologi baru untuk mengelolah sumber daya yang ada dengan memperhatikan dampak lingkungannya” (hasil wawancara oleh MF pada tanggal 6/6/2024)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan sumber daya yang ada dilakukan masyarakat lokal dan masyarakat pendatang yang berlebihan tanpa memperhatikan ekosistem. Masyarakat lokal mempunyai sistem pengelolaan yang ramah lingkungan namun dengan perubahan dan tuntutan ekonomi merubah pola pikir masyarakat. Ekosistem dan lingkungan tidak lagi sebagai sesuatu yang dipertahankan.

Begitu pula pengaruh dari masyarakat pendatang yang menimbulkan berbagai kecemburuan masyarakat lokal.

Hal ini juga disampaikan oleh informan Masyarakat bahwa kerja sama dan motivasi dari pemerintah sudah baik, hal ini dijelaskan secara rinci bahwa:

“dalam pengelolaan pariwisata Taka Bonerate kami disini bekerjasama dengan pihak kelompok sadar wisata agar pengelolaan bisa maksimal karena jika hanya Dinas Pariwisata saja yang mengelola Taka Bonerate saya rasa sulit untuk mengelola kawasan Taka Bonerate. (hasil wawancara oleh informan SH pada tanggal 7/6/2024)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengungkapan pengelolaan pariwisata Taka Bonerate melibatkan pihak lain. Dimana dalam mengelola Taka Bonerate pihak dari Dinas Pariwisata melakukan kerjasama dengan pihak Kelompok Sadar Wisata karena dalam pengelolaan pariwisata tidak bisa dilakukan secara sendiri akan tetapi memerlukan pihak lain.

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu jalan yang harus ditempuh adalah dengan melakukan deliberasi namun deliberasi (diskusi bersama) dalam kolaborasi mengelola Taka Bonerate, Proses deliberasi dalam kolaborasi adalah untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam pariwisata yang dilakukan melalui diskusi bersama antara pihak yang berada dalam ruang lingkup pengelolaan pariwisata seperti pihak Dinas Pariwisata dan Kelompok Sadar Wisata. Diskusi yang dilakukan oleh kedua pihak bertujuan untuk menghasilkan ide serta solusi untuk pengembangan

dan penyelesaian masalah yang ada jadi harus selalu dilakukan, karena mengingat hal ini tidak dapat diselesaikan jika hanya melibatkan pihak Dinas Pariwisata saja akan tetapi harus melibatkan pihak lain juga seperti pihak dari Kelompok masyarakat dalam pengelolaan pariwisata Taka Bonerate.

2. Tindakan-Tindakan Kolaborasi

Tindakan-tindakan kolaborasi pada prakteknya sangatlah bermacam-macam apapun bentuk yang dilakukan baik dalam wujud kegiatan sosialisasi maupun bimtek yang dilakukan oleh pihak yang berkolaborasi. Memfasilitasi pada proses kolaborasi merupakan cara untuk mempermudah dan melancarkan pelaksanaan kolaborasi. Memfasilitasi adalah sebuah kegiatan yang dapat menjelaskan suatu pemahaman, keputusan serta tindakan yang dilakukan secara individual atau bersama dengan orang lain dengan tujuan mempermudah tugas yang dijalankan.

Hal ini disampaikan oleh informan Kepala Dinas yang membantu pengelola wisata Takabonerate dijelaskan bahwa.

“pihak kami biasa memfasilitasi dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar menumbuhkan kesadaran wisata, kami juga melakukan bimtek kepada Masyarakat sekitar wisata Taka Bonerate. Namun kami akui bahwa hal ini jarang kami lakukan apalagi sekarang Masyarakat wisata disana sudah membantu mempercantim wisata agar diminati banyak wisatawan (hasil wawancara oleh informan NI pada tanggal 5/6/2024)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa sosialisasi mengenai peran dan kontribusi diberikan kepada masyarakat agar

kesadaran mereka terhadap wisata dapat bertumbuh, serta memberikan bimbtek kepada POKDARWIS agar anggotanya dapat berkompeten dan memajukan wisata Taka Bonerate yang baik dan digemari oleh banyak orang dan wisatawan baik dalam Kabupaten maupun luar Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berbagai pemikiran, masukan dan penjelasan serta arahan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dari Kepala LIPI, serta dukungan para mitra diharapkan mampu menjadi semangat baru dan energi baru bagi pengelola kawasan Taman Nasional Taka Bonerate dan forum pengelolaan Cagar Biosfer Taka Bonerate Kepulauan Selayar, dan tentunya masyarakat kepulauan Selayar secara keseluruhan ikut dalam penyelenggaraan pembangunan di Kepulauan Selayar ini. Akhirnya dengan terselenggaranya kegiatan ini sejak tanggal 10 sd 12 September 2015, pihak panitia dan kita semua patut berbangga dan ucapan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang berkontribusi langsung maupun tidak langsung sehingga kegiatan ini sukses diselenggarakan.

Gambar 4.4 *Rakor Forum Cagar Biosfer Taka Bonerate Kepulauan*

Selayar 11 Sept 2015



Sumber: <https://tntakabonerate.com/id/mewujudkan-taka-bonerate-menjadi-taman-nasional-bertaraf-dunia/>

Dalam sebuah kolaborasi kepercayaan bersama sangat penting karena proses pengelolaan tidak hanya melibatkan satu pihak saja akan tetapi melibatkan pihak lain sehingga dalam pengelolaannya kepercayaan kepada semua pihak harus ada untuk memperlancar kolaborasi yang dilakukan dalam pengelolaan dan pengembangan wisata bahari taman nasional Taka Bonerate. Kepercayaan bersama sangat dibutuhkan oleh setiap lembaga yang memiliki kepentingan untuk kelancaran proses kolaborasi yang baik seperti hasil wawancara dengan salah satu informan pengelola wisata sebagai berikut:

“saya kira dalam pengelolaan kepercayaan itu sangat penting karena kita ini melakukan kerjasama, artinya mereka harus tahu bagaimana pengembangan pariwisata itu mulai dari bawah ke atas ataupun dari atas kebawah akan tetapi sekarang kami sudah jarang menyampaikan sesuatu kepada pihak dari kelompok masyarakat

karena mereka yang kurang aktif dalam pengelolaan ini (hasil wawancara informan AH pada tanggal 6/6/2024).

Dari hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kepercayaan dengan pihak lain sangat penting dalam melakukan kolaborasi karena tanpa adanya kepercayaan antara pihak yang melakukan kolaborasi maka kolaborasi tidak akan berjalan dengan baik.

Hal ini juga disampaikan oleh informan Masyarakat yang mengatakan bahwa

“dalam pengelolaan pariwisata kita mengacu pada aturan dari Dinas Pariwisata yang tertuang dalam SK Kepala Dinas Pariwisata jadi itulah yang kami ikuti” (hasil wawancara oleh informan AA pada tanggal 7/6/2024)

Dari hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa Komitmen dalam sebuah kolaborasi penting dan sangat dibutuhkan karena dalam melakukan tindakan harus memiliki komitmen dengan jelas agar kolaborasi dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan bersama dapat dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa mengenai peran dalam memfasilitasi kolaborasi pengelolaan pariwisata Taka Bonerate guna memperlancar dan mempermudah proses kolaborasi yang dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat mengenai peran dan kontribusi terhadap kepariwisataan serta memberikan bimtek atau pelatihan kepada pihak Kelompok Sadar Wisata untuk meningkatkan kemampuan dalam hal pengelolaan pariwisata. Memfasilitasi adalah sebuah kegiatan yang dapat menjelaskan suatu pemahaman, keputusan serta

tindakan yang dilakukan secara individual atau bersama dengan orang lain dengan tujuan mempermudah tugas yang dijalankan, upaya yang dilakukan pihak yang bekerjasama untuk memajukan kolaborasi dengan berusaha saling terbuka seperti memberitahu rencana yang akan dilakukan dan ingin dicapai serta mengadakan pertemuan.

3. Dampak dan Adaptasi Pada Proses Kolaborasi

Dalam proses penelitian yang dilakukan akhirnya akan memberikan dampak. Dari berbagai dampak tentu akan menghasilkan feedback atau umpan balik, dan akan diadaptasi oleh kolaborasi. Adaptasi yang dimaksud ialah bagaimana kolaborasi menyikapi umpan balik dari masing-masing pihak yang terlibat.

Hal yang diungkapkan dari hasil wawancara dengan salah satu informan kepala Dinas Pariwisata sebagai berikut:

“mengelola pariwisata itu sulit ketika kita sendiri yang melakukannya karena pada dasarnya banyak hal yang harus dilakukan dan dengan sumber daya yang kurang maka kita harus melakukan kolaborasi dengan pihak yang lain yang disini adalah kelompok pengelola dan dampaknya kesadaran masyarakat mulai agak tumbuh. Akan tetapi kolaborasi ini berjalan dengan baik karena pihak pokdarwis yang aktif dalam berpartisipasi sehingga bisa kita lihat dari Taman Nasional Taka Bonerate berkembang dengan baik” (hasil wawancara oleh informan NI pada tanggal 5/6/2024)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa proses kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata Taka Bonerate sudah memberikan dampak seperti pengetahuan masyarakat akan sadar wisata sudah ada dilihat dari

kebiasaan sudah menjaga kebersihan lingkungan area pantai dan bersikap ramah terhadap wisatawan dan menjaga keamanan.

Hal ini disampaikan oleh informan Pengelola Taka Bonerate yang menjelaskan bahwa:

“pengelolaan pariwisata Taka Bonerate yang tidak dapat dilakukan secara sendiri, makanya kami melibatkan diri dengan melakukan kolaborasi dengan pihak Dinas Pariwisata dalam pengelolaan pariwisata ini. Namun kolaborasi ini kami rasa sudah memberikan dampak yang signifikan bagi wisata Taka Bonerate dan pihak dari Dinas Pariwisata jalan masing-masing dan memperhatikan masyarakat dan pengelola.” (hasil wawancara oleh informan MF pada tanggal 5/6/2024)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses kolaborasi yang dilakukan pada pengelolaan pariwisata Taka Bonerate memberikan dampak yaitu mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat mengenai sadar wisata dan membuka peluang lapangan kerja dan peluang pendapatan bagi masyarakat.

Dalam penelitian ini dampak dan adaptasi merupakan bagian paling akhir dari proses kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata. Pada bagian ini hasil kolaborasi dan evaluasi kolaborasi menjadi hal krusial untuk menilai berhasilnya sebuah proses kolaborasi. Hasil kolaborasi antara dinas pemuda olahraga dan pariwisata dengan asosiasi usaha pariwisata dapat nilai sangat baik sebab mampu menghasilkan produk regulasi, kegiatan/program bersama dan membangun objek wisata baru. Yang menjadi catatan penting yakni adanya hasil kolaborasi dalam bentuk regulasi, hal ini dapat dikatakan sebuah bentuk prestasi dalam proses kolaborasi. Adapun regulasi yang

dimaksud adalah : 1. Peraturan daerah kabupaten Kepulauan Selayar nomor 8 tahun 2014 tentang rencana induk pengembangan pariwisata (RIPDA) kabupaten Kepulauan Selayar, yang memuat rencana jangka panjang pengembangan pariwisata. 2. Peraturan daerah kabupaten Kepulauan Selayar nomor 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan, yang memuat tentang penyederhanaan izin operasional usaha pariwisata. 3. Rancangan peraturan bupati tentang tarif/ biaya masuk destinasi wisata 4. Membentuk tim satuan tugas pariwisata. Bertugas untuk memantau dan mengidentifikasi objek wisata baru yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Hal ini di sampaikan oleh informan pengelola wisata yang mengatakan bahwa

“Pertemuan dan komunikasi untuk membuahkan saran atau ide-ide inisiatif yang dapat memberikan pengembangan pariwisata bahari dan jejaring internasional. Selain itu kegiatan pameran tingkat nasional, kemudian promosi dan informasi melalui media sosial dan website TN Taka Bonerate juga memberikan kesempatan kepada pemerhati untuk turut dalam sumbangsih saran dan ide-ide inisiatif tentang pariwisata alam dan jejaring internasional” (hasil wawancara oleh informan MF pada tanggal 5/6/2024)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk evaluasi kolaborasi pemerintah daerah dalam hal ini dinas pemuda olahraga dan pariwisata dengan pihak asosiasi usaha pariwisata telah menginisiasi perbaikan dan penguatan yang sifatnya substantif dalam pengembangan pariwisata. Utamanya yang berkaitan dengan penambahan anggaran dan penguatan regulasi. Dampak dan Adaptasi Pada Proses Kolaborasi pada

akhirnya diharapkan dapat menjadi acuan keberhasilan kolaborasi. Dampak positif tentu akan menjadi permanen sedangkan dampak negative sifatnya sementara.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi Taka Bonerate sudah memberikan dampak berupa kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh akan kepariwistaan serta membuka peluang pendapatan kepada masyarakat namun hal ini sudah signifikan karena kondisi Taka Bonerate sudah berkembang dengan baik dilihat dari SAPTA PESONA dikawasan Taka Bonerate sudah tercapai secara keseluruhan dan pihak Dinas pariwisata seakan-akan jalan sendiri dalam melakukan pengelolaan dan mengesampingkan masyarakat dari berbagai dampak yang dihasilkan dari proses kolaborasi ini tanggapan kedua pihak yang bekerjasama mengenai dampak yang dihasilkan sudah cukup baik walaupun masih ada tujuan yang belum dicapai. Hal ini ketika dikaitkan dengan teori dari Balogh dkk yang digunakan menunjukkan bahwa dalam proses kolaborasi dalam pengelolaan Taka Bonerate sudah memberikan dampak yang kemudian menghasilkan umpan yang nantinya akan diadaptasi oleh kolaborasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pada bab sebelumnya bahwa fokus peneliti pada kolaborasi pengelolaan pariwisata Taka Bonerate maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinamika dalam kolaborasi pengelolaan pariwisata Taka Bonerate sudah cukup terlaksana dengan baik walaupun dalam pengungkapan sudah cukup baik karena melibatkan pihak kelompok masyarakat namun kelompok ini secara kelembagaan tidak terlalu aktif, serta komunikasi belum berjalan dengan baik juga kurangnya kepercayaan antara kedua pihak dan komitmen mereka belum kuat walaupun dalam berkolaborasi sudah mengacu pada SK Kepala Dinas Pariwisata.
2. Tindakan-tindakan kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata Taka Bonerate dalam memfasilitasi kolaborasi sudah cukup maksimal karena jarang ada pelatihan dan sosialisasi tentang kepariwisataan guna meningkatkan kemampuan pihak yang berkolaborasi, dan untuk memajukan proses kolaborasi pihak yang bekerjasama jarang melakukan pertemuan.
3. Dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi pengelolaan pariwisata Taka Bonerate sudah memberikan dampak berupa kesadaran masyarakat yang

mulai tumbuh akan kepariwistaan serta membuka peluang pendapatan kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Collaborative Governance dalam pengelolaan pariwisata Taka Bonerate, oleh karena itu peneliti menyarankan:

1. Dinas Pariwisata dan pengelola harus lebih berperan aktif serta perlu ada regenerasi di pihak pengelola agar lebih aktif lagi berkolaborasi dalam melakukan pengelolaan untuk mengembangkan pariwisata Taka Bonerate.
2. Dinas Pariwisata dan pengelola harus membangun komunikasi dan melakukan pertemuan. Serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang ada dikawasan wisata untuk memberikan pemahaman tentang sadar wisata.
3. Dinas Pariwisata dan pengelola harus lebih meningkatkan lagi proses kolaborasi yang dilakukan agar dapat mengembangkan Taka Bonerate menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D. (2018). Kolaborasi Antara Aparatur Birokrasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (Fprb) Diy Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 9(1), 87–103. <https://doi.org/10.31334/trans.v9i1.87>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Astuti, W. dan R. (2020). Sampul Collaborative Governance. *Collaborative Govenance Dalam Perspekit Publik*, 161.
- Bachtiar, N., Tamrin, S. H., Pauzi, R., Prilasandi, A. D., & Rafliansyah, M. (2022). Collaborative Process Dalam Pengelolaan Desa Wisata Collaborative Process in the Management of Tourist Village. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(3), 340–364.
- Djogeh Harmana, Ella L. Wargadinata, & Ismail Nurdin. (2021). Pengelolaan Sampah Berbasis Collaborative Governance Di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 13(2), 247–260. <https://doi.org/10.54783/jv.v13i2.430>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Emerson, K., & Woo, M. I. N. (2022). *through Research Informing Practice through Research. April*.
- Haryono, N. (2012). Jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik. *Jurnal Jejaring Administrasi Publik*, 1(4), 48–53.
- Ifdal. (2015). Kolaboratif: Kerangka Kerja Konselor Masa Depan. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 3(2), 1–7.
- Mutiarawati, T., & Sudarmo, S. (2021). Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Wacana Publik*, 1(1), 82. <https://doi.org/10.20961/wp.v1i1.50892>
- Niswati, R., Nur, A. C., & Aslindah, A. (2020). Kemitraan Digitalisasi dan Inovasi Kebijakan Publik di Era Globalisasi. In *Universitas Negeri Makassar*. <http://eprints.unm.ac.id>
- Ramdani, R., Nasution, A. P., Ramanda, P., Sagita, D. D., & Yanizon, A. (2020). Strategi Kolaboratif Dalam Manajemen Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah. *Educational Guidance and Counseling Development Journal*,

III(1), 1–7.
<http://journal.stkipmuhammadiyahbarru.ac.id/index.php/jubikops/article/view/14>

Silalahi, U., & Syafri, W. (2015). Desentralisasi Dan Demokrasi Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Pemerintah Daerah Lebih Transparan, Partisipatif, Responsif dan Akuntabel. In *Ipdn Press* (Vol. 53, Issue 9).

Susilawati, Mappamiring, H., & Said, A. (2016). Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai Bira Sebagai Sumber Unggulan Pendapatan Asli di Daerah Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(3), 351–366.

Tamrin, H., & Raharja, W. T. (2021). *Kolaborasi membangun negeri*. 1–141.

Tresiana, N., & Noverman Duadji, D. (2017). Kolaboratif Pengelolaan Pariwisata Teluk Kilauan (Collaborative Management Of The Teluk Kiluan Tourism). *Membangun Etika Sosial Politik Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan*, 77–84. <http://repository.lppm.unila.ac.id/13941/>

Tri Sambodo, G., & Pribadi, U. (2016). Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DI. Yogyakarta. *Journal of Governance and Public Policy*, 3(1). <https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0052>

Utama, I. G. B. R. (2014). Pengantar Industri Pariwisata. In *Deepublish Yogyakarta*. https://books.google.co.id/books/about/Pengantar_Industri_Pariwisata.html?id=lqr4CQAAQBAJ&redir_esc=y

YUNIAR, D. M. (2022). *Collaborative Governance Untuk Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kota Bandung*. 1–23.

LAMPIRAN





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 4427/05/C.4-VIII/VI/1445/2024

05 June 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

28 Dzulqa'dah 1445

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Taman Nasional Taka Bonerate

di -

Selayar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0548/FSP/A.1-VIII/VI/1445/2024 tanggal 4 Juni 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **ARIYANDI**

No. Stambuk : **10564 1111419**

Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN WISATA BAHARI TAMAN NASIONAL TAKA BONERATE DI KABUPATEN KEPUALAUAN SELAYAR"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 11 Juni 2024 s/d 11 Agustus 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.

NBM 1127761

06-24



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung MPP Jln. Ahmad Yani Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 21083, email: pmptpselayar@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 0837/ Penelitian/VI/2024/DIS PMPTSP

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

Nama Peneliti : **ARIYANDI**
Alamat Peneliti : **Dusun Pasir Putih, Desa Khusus Bahuluag, Kec. Bontosikuyu**
Nama Penanggung Jawab Anggota Peneliti : **ARIYANDI**

Untuk melakukan penelitian dalam rangka "Untuk Memperoleh Data-Data Dan Memperoleh Pengetahuan Atau Penemuan Baru Sebagai Pembuktian Atau Pengkajian Dari Pengetahuan Yang Sudah Ada" di :

Lokasi Penelitian : **Taman Nasional Takabonerate**
Judul Penelitian : **Collaborative Governance Dalam Pengembangan Wisata Bahari Taman Nasional Takabonerate Di kabupaten Kepulauan Selayar**
Lama Penelitian : **2 Bulan**
Bidang Penelitian : **Kualitatif**
Status Penelitian : **Perorangan**


Surat Keterangan Penelitian ini berlaku sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024



Dikeluarkan : **Benteng**
Pada Tanggal : **27 Juni 2024**

A.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

KEPALA DINAS

 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

Drs. H. ANDI NUR HALJO, M.Si

NIP. 19660507 198603 1 022

Rp. 0,-

Tembusan

1. Kepala Badan Kesbangpol di Benteng
2. Arsip



DOKUMENTASI WAWANCARA

1. BAPAK KEPALA DINAS Muh Ihan Chairuddin Tanggal 5/6/2024



2. PENGELOLA WISATA Muh Faisal Tanggal 5/6/2024



3. PENGELOLA WISATA Ahmad Tanggal 6/6/2024



4. PEDANGAN BAPAK Hamsir Tanggal 6/6/2024



5. DOKUMENTASI MASYARAKAT Bapak Sahabuddin tanggal 7/7/2024





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Ariyandi

Nim : 105641111419

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	9 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 22 Agustus 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 Submitted to Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Student Paper 2%
- 2 princesskikystory.blogspot.com
Internet Source 2%
- 3 Ahmad Cahyadi, Romza Fauzan Agniy, Sembodo Noviandaru. "Karakterisasi Hidrogeokimia Airtanah untuk Analisis Genesis Airtanah Di Pulau Koral Sangat Kecil (Studi Kasus di Pulau Koral Pramuka, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta)", INA-Rxiv, 2017
Publication 2%
- 4 www.coursehero.com
Internet Source 2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

AB II Ariyandi 105641111419

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

9%



Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography



BAB III Ariyandi 105641111419

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

polhutwidyaiswara.blogspot.com

Internet Source

3%

2

eprints.uns.ac.id

Internet Source

2%

3

etd.umy.ac.id

Internet Source

2%

4

press.umsida.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

< 2%



BAB IV Ariyandi 105641111419

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

2%

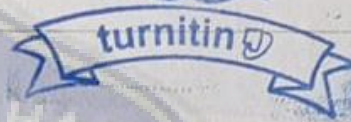
PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	5%
2	repository.its.ac.id Internet Source	2%
3	id.wikipedia.org Internet Source	2%



Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off

BAB V Ariyandi 105641111419

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

docplayer.info

Internet Source

4%



Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



RIWAYAT HIDUP



Ariyandi Seorang laki-laki yang lahir 23 April 1997 di dusun Pasir Putih Kecamatan bontosikuyu Kabupaten kepulauan Selayar Penulis Merupakan Anak pertama dari 4 Bersaudara. Dari pasangan Bapak Muh.ilyas dan Ibu Raja pati.

Penulis masuk pendidikan sekolah SDN BAHULUANG pada tahun 2006 dan tamat Pada Tahun 2012. Pada tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan di SMP NEGERI 2 BONTONSIKUYU dan Tamat Tahun 2015. Penulis melanjutkan Pendidikan ke Jenjang Selanjutnya di SMA MUHAMMADIYAH BENTENG dan usai di Tahun 2018. Beliau melanjutkan Pendidikan di perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan.

Dan Alhamdulillah pada tanggal penulis 30 agustus 2024 penulis menyelesaikan Ujian Tutup dengan IPK 3.5 dan pada tanggal 08 oktober 2024 penulis di wisudakan di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Gelar ARIYANDI S. IP dengan judul skripsi “Collaborative Governance Dalam Pengembangan Wisata Bahari Taman Nasional Taka Bonerate Di Kabupaten Kepulauan Selayar”.

Penulis di amanahkan mejadi anggota bidang Humas Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar Dan di tahun 2019-2020.

Saya memegang moto “GAGAL BERASAL DARI RASA TAKUT YG TIDAK DILAWAN”